

Pengaruh Efektivitas Dewan Komisaris dan Komite Audit Terhadap *Tax Aggressiveness*

Mirna Dyah Praptitorini
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Totalwin Semarang

ABSTRACT

The existence of governance structure such as board of commissioners and audit committee implies a better monitoring function on the financial reporting process that represent manager actions. Nevertheless, the quality of the monitoring function depends on how effective the board and the audit committee perform their duties. This study examines how the effectiveness of the board of commissioners and audit committee in a two tierboard structure influences the tax aggressiveness. This study develops a score for board and audit committee effectiveness by using a checklist which captures how the independence, activity, size, and competence characteristics are reflected in the board of commissioners and audit committee. Hypothesis testing is carried out by using a multiple regression model of 105 observations (firm-year) with the sample taken from manufacture companies listed on the Indonesian Stock Exchange during t. Results of this study provide robust evidence that a more effective board of commissioners and audit committee will decrease tax aggressiveness.

Keywords: corporate governance, effective board of commissioner, effective audit committee, tax aggressiveness

PENDAHULUAN

Pajak menurut Pasal 1 UU Nomor 28 Tahun 2007 merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi kemakmuran rakyat. Dari sudut pandang perusahaan, pajak merupakan salah satu komponen biaya yang mengurangi laba perusahaan. Beban pajak yang tinggi mendorong banyak perusahaan berusaha melakukan perencanaan

pajak agar pajak yang dibayarkan lebih sedikit.

Tindakan agresif manajer dalam perencanaan pajak dapat dilakukan salah satunya dengan melakukan *tax aggressiveness* dimana perusahaan berusaha mengurangi beban pajaknya dengan carayang legal dan tidak bertentangan dengan undang-undang perpajakan atau dapatjuga dikatakan memanfaatkan kelemahan dalam undang-undang perpajakan yang berlaku (Suandy, 2008). Investor berharap perusahaan menunjukkan perilaku yang patuh terhadap aturan perpajakan, karena investor menyadari bahwa perilaku penghindaran pajak (*tax avoidance*)

ataupun agresivitas pajak (*tax aggressiveness*) akan berdampak merugikan pada return investasi (Henderson Global Investors, 2005). Meskipun demikian, fenomena *tax aggressiveness* masih banyak terjadi baik di dalam maupun luar negeri seperti yang dilakukan oleh PT. Coca Cola Indonesia, PT. Asian Agri, Starbuck dan sebagainya.

Desai dan Dharmapala (2006) menekankan jika yang menggerakkan jalannya perusahaan adalah manajer, maka pelaku utama *tax aggressiveness* adalah manajer perusahaan. Manajer yang menentukan seberapa tingkat *tax aggressiveness* yang dilakukan perusahaan. Masalah timbul bila manajer memanfaatkan posisinya untuk mengalihkan sumberdaya perusahaan bagi keuntungan pribadinya, yang biasa disebut dengan masalah agensi. Disinilah peran *corporate governance* yang merupakan mekanisme untuk mengontrol manajer agar bertindak sesuai dengan kepentingan pemegang saham (Puspita dan Harto, 2014).

Bapepam-LK telah mengeluarkan berbagai peraturan untuk meningkatkan implementasi *corporate governance* perusahaan. Salah satu peraturan adalah terkait persyaratan umum untuk sekuritas dengan karakteristik ekuitas di bursa efek (Lampiran II Kep-305/BEJ/07-2004). Peraturan ini mengatur tentang keharusan keberadaan komite audit dan komisaris independen di dewan komisaris perusahaan.

Keberadaan mekanisme internal *corporate governance* seperti komite audit dan dewan komisaris menunjukkan adanya fungsi pengawasan yang lebih baik pada

proses pelaporan keuangan, perpajakan, manajemen resiko, pelaksanaan audit dan implementasi dari *corporate governance* di perusahaan-perusahaan. Namun, kualitas fungsi pengawasan sangat bergantung pada efektivitas komite audit dan dewan komisaris dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya, yang seringkali disebut dengan karakteristik komite audit dan dewan komisaris. Pengawasan dari komite audit dan dewan komisaris yang efektif diharapkan mampu untuk mengurangi kesempatan manajer dalam melakukan kecurangan dan meminimalisir adanya tindakan pajak agresif perusahaan (Putranti dan Setiawanta, 2014).

Beberapa peneliti telah meneliti pengaruh mekanisme *corporate governance* terhadap *tax aggressiveness* meskipun hasilnya beragam, antara lain Lanis dan Richardson (2011) menyimpulkan bahwa semakin tinggi dewan direksi yang berasal dari luar perusahaan akan menurunkan kecenderungan *tax aggressiveness*. Penelitian Seprini (2016) memberikan bukti bahwa ukuran dewan komisaris dan intensitas pertemuan komite audit berpengaruh signifikan terhadap tindakan pajak agresif. Sedangkan penelitian Zemzem dan Ftouhi (2013) tentang *board characteristics* memberikan hasil bahwa *board diversity* dan *board size* berpengaruh terhadap *tax aggressiveness*, sedangkan *outside director* dan *duality* tidak berpengaruh terhadap *tax aggressiveness*.

Penelitian-penelitian di atas menggunakan berbagai proksi untuk mengukur *corporate governance* perusahaan. Tetapi belum terdapat

penelitian yang menggunakan efektivitas dari komite audit dan dewan komisaris sebagai proksi *corporate governance* dalam mempengaruhi *tax aggressiveness*. Penelitian ini menggunakan *score* yang dikembangkan oleh Hermawan (2011) untuk mengukur efektivitas komite audit dan dewan komisaris dengan *checklist* yang menangkap bagaimana karakteristik independensi, aktivitas, ukuran dan kompetensi tercermin pada komite audit dan dewan komisaris. Penelitian Hermawan (2009; 2011) dan Koech dan Namusonge (2013) menemukan bahwa karakteristik-karakteristik tersebut diperlukan agar komite audit dan dewan komisaris dapat meningkatkan kualitas efektivitas *corporate governance* perusahaan.

LITERATUR

Agency Theory

Agency theory berusaha untuk menjawab masalah keagenan yang disebabkan karena pihak-pihak yang menjalin kerja sama dalam suatu perusahaan mempunyai tujuan yang berbeda termasuk dalam menjalankan tanggungjawabnya untuk mengelola suatu perusahaan (Jensen dan Meckling, 1976). Manajer sebagai *agent* akan bertindak *opportunistic*, yaitu mengutamakan kepentingan pribadinya untuk mendapatkan keuntungan dari hasil yang telah dicapai dalam mengelola tanggung jawab dari pemegang saham (*principal*), sehingga menimbulkan masalah agensi (dalam hal ini adalah *tax aggressiveness*). Desai & Dharmapala (2006) menunjukkan bahwa keputusan agresivitas perpajakan berada dalam kerangka

agensi, di mana para manajer dapat menikmati keuntungan pribadi dengan mengorbankan kepentingan pemegang saham.

Jensen dan Meckling (1976) menyatakan bahwa *agency cost* terdiri atas *monitoring cost* dan *bonding cost*. *Bonding cost* merupakan *agency cost* yang ditanggung oleh direksi yang mencerminkan upaya manajemen dalam menunjukkan kepada *shareholder* agar tidak menyalahgunakan wewenang yang diberikan. *Corporate governance* dikatakan dapat menurunkan *monitoring cost* dengan adanya peningkatan pengawasan dan transparansi (Jensen dan Meckling, 1976).

Tax Aggressiveness

Tindakan pajak agresif adalah suatu tindakan yang ditujukan untuk menurunkan laba kena pajak melalui perencanaan pajak (*tax planning*) yang tepat. Agresivitas pajak perusahaan dapat dilihat dalam dua cara berdasarkan beberapa deskripsi. Pertama adalah dengan mengetahui jenis transaksi yang menguntungkan menurut undang-undang perpajakan. Ini adalah penghindaran pajak yang legal. Cara kedua adalah dengan melakukan *tax sheltering* (Yeung 2010).

Manfaat *tax aggressiveness* bagi pemegang saham mencakup penghematan pajak yang lebih besar untuk perusahaan, namun biaya yang harus ditanggung lebih merugikan, mencakup potensi denda dan denda pajak yang harus dikenakan oleh administrasi perpajakan, biaya pelaksanaan (*implementation cost*), biaya reputasi (*reputational cost*), dan

biaya politik (*political cost*). (Scholes et al 2005; Slemrod 2004).

Keuntungan dan kerugian dari tindakan agresivitas pajak ini membuat manajer sebagai pembuat keputusan perusahaan harus memperhitungkan tindakan yang diambilnya. Bila keputusan yang diambil oleh manajer menyebabkan kerugian, maka dapat menyebabkan konflik antara pemilik perusahaan atau pemegang saham dan manajer yang disebut dengan *agency problem*.

Corporate Governance

The Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG) mengemukakan konsep *Good Corporate Governance* dapat didefinisikan sebagai serangkaian mekanisme untuk mengarahkan dan mengendalikan suatu perusahaan agar operasional perusahaan berjalan sesuai dengan harapan para pemangku kepentingan (*shareholders*). Menurut Nasution dan Setiawan (2007), *Corporate Governance* merupakan konsep yang diajukan demi peningkatan kinerja perusahaan melalui supervisi atau *monitoring* kinerja manajemen dan menjamin akuntabilitas manajemen terhadap *stakeholder* dengan mendasarkan pada kerangka peraturan.

Prinsip-prinsip *corporate governance* berdasarkan Pedoman Umum *Good Corporate Governance* Indonesia tahun 2006 adalah sebagai berikut:

1. Keterbukaan (*transparency*)

Transparansi adalah pengungkapan kinerja perusahaan secara akurat dan tepat pada waktunya serta transparansi atas hal-hal penting perusahaan. Untuk menjaga

tujuan dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus menyediakan informasi yang relevan dan dipahami oleh *stakeholders*.

2. Akuntabilitas (*accountability*)

Perusahaan harus bertanggung jawab terhadap transparansi dan kewajaran performanya. Jadi perusahaan harus diatur dalam cara yang pantas dan terukur, sehingga sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan juga mempertimbangkan kepentingan pemegang saham dan *stakeholder* lainnya. Akuntabilitas adalah prasyarat untuk mencapai kinerja yang berkelanjutan.

3. Pertanggungjawaban (*responsibility*)

Responsibilitas adalah tanggung jawab dari manajemen, pengawas manajemen yang akan bertanggung jawab kepada perusahaan dan para pemegang saham. Prinsip ini dapat diwujudkan dengan kesadaran bahwa tanggung jawab adalah konsekuensi logis dari adanya wewenang, tanggung jawab sosial dan menghindari penyalahgunaan wewenang kekuasaan, menjadi profesional dan menjunjung etika dan memelihara bisnis yang sehat.

4. Independensi (*independency*)

Untuk mempercepat implementasi prinsip-prinsip *good corporate governance*, perusahaan harus dikelola secara independen diatur dengan kekuatan seimbang yang tepat, dengan cara tidak ada satu pun organ dalam perusahaan yang mendominasi organ lainnya dan tidak ada campur tangan dari pihak lain.

5. Kewajaran (*fairness*)

Perusahaan harus mempertimbangkan kepentingan pemegang saham dan *stakeholder* lainnya berdasarkan prinsip kejujuran.

Efektivitas Komite Audit

Komite audit merupakan komponen penting dalam struktur *corporate governance* untuk mendorong akuntabilitas dan transparansi. Klein (2002) menemukan bahwa komite audit independen dapat menghambat manipulasi laporan keuangan, terutama bila ada mayoritas direksi independen di komite audit, walaupun tidak perlu semua anggota komite audit independen.

Komite audit aktif diharapkan dapat melaksanakan tugasnya berdasarkan piagam komite audit secara efektif. Komite audit yang lebih sering melakukan rapat mungkin berfungsi lebih efektif. Ukuran komite audit dapat mempengaruhi efektivitas fungsi pengawasan komite audit. Anderson dkk. (2004) menemukan bahwa kreditur menganggap perusahaan dengan ukuran komite audit yang lebih besar memiliki tata kelola perusahaan yang lebih baik, sehingga biaya hutang bisa lebih rendah.

Tugas komite audit terkait erat dengan proses penyusunan dan audit laporan keuangan, sehingga komite audit harus memiliki kompetensi dalam bidang akuntansi atau keuangan untuk dapat berfungsi secara efektif. Di Indonesia, peraturan Bursa Efek Indonesia dan Bapepam-LK mensyaratkan setidaknya satu anggota komite audit memiliki latar belakang pendidikan di bidang

akuntansi atau keuangan (Puspita dan Harto, 2014).

Efektivitas Dewan Komisaris

Dewan komisaris mewakili pemegang saham perusahaan untuk memastikan semua tindakan manajemen sesuai dengan kepentingan perusahaan. Karakteristik dewan komisaris di Indonesia sedikit berbeda dengan karakteristik direksi perusahaan di Amerika Serikat dan negara lain yang menerapkan sistem *one-tier* untuk sistem dewan. Perusahaan-perusahaan di Indonesia mengadopsi sistem *two-tier*, yang berarti ada pemisahan antara dewan komisaris dan direksi, sehingga situasi dualitas CEO-Chair tidak akan pernah terjadi. Namun, karakteristik lain seperti independensi, ukuran, dan keahlian juga relevan bagi dewan komisaris di Indonesia.

Status independensi anggota dewan merupakan karakteristik dewan yang penting untuk menjaga tindakan dan pengambilan keputusan yang tidak bias mengenai fungsi pengawasan dewan. Dengan memiliki anggota dewan komisaris independen yang memenuhi persyaratan tersebut, fungsi dewan diharapkan lebih efektif karena anggota dewan komisaris yang independen tidak memiliki benturan kepentingan saat melaksanakan tugasnya. Berdasarkan peraturan Bapepam-LK pada Lampiran II Kep-305 / BEJ / 07 -2004, jumlah komisaris independen harus proporsional dengan jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham minoritas, dan harus sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) dari jumlah anggota dewan komisaris.

Karakteristik dewan komisaris yang dapat mempengaruhi efektifitas pengawasan dewan adalah kegiatannya dalam hal melakukan rapat dewan. Dewan komisaris yang aktif dan mengadakan rapat rutin akan dapat melakukan pengawasan yang lebih sistematis dan dapat menemukan permasalahan di awal (Hermawan, 2011). Jumlah anggota dewan dapat mempengaruhi efektifitas kinerja dewan komisaris. Namun, literatur yang ada masih menunjukkan hasil yang beragam pada hubungan ukuran dewan dan efektifitas dewan.

Efektivitas peran pengawasan anggota dewan komisaris akan bergantung pada pengalaman, pengetahuan, dan latar belakang pendidikan mereka, sehingga mereka dapat memiliki kemampuan untuk memahami operasi bisnis perusahaan. Selain itu, anggota dewan komisaris juga harus memiliki kompetensi dalam memahami laporan keuangan perusahaan, karena kinerja keuangan yang dilaporkan merupakan salah satu informasi yang digunakan dalam mengevaluasi tindakan manajemen.

PENGEMBANGAN HIPOTESIS

1. Pengaruh Efektivitas Dewan Komisaris terhadap *Tax Aggressiveness*

Dewan komisaris menjalankan fungsinya secara efektif jika mereka dapat mencegah tindakan oportunistik manajemen. Efektivitas dewan komisaris dipengaruhi oleh beberapa karakteristik, seperti independensi dewan, aktivitas dewan, ukuran dewan, dan kompetensi dewan (Zhou dan Chen, 2004).

Salah satu tindakan oportunistik manajemen adalah *tax aggressiveness*. Dimana tindakan ini akan merugikan para pemegang saham dalam jangka panjang. Dengan demikian, tindakan *tax aggressiveness* dapat dipengaruhi oleh efektifitas dewan komisaris dalam melaksanakan tugasnya, dan efektifitas dewan tergantung pada karakteristik dewan.

Karakteristik dewan akan mempengaruhi efektifitas dewan secara simultan, oleh karena itu lebih baik dalam mengukur efektifitas dewan dilakukan secara komprehensif dengan menggunakan indeks atau skor. Skor akan mencerminkan tingkat efektifitas dewan komisaris dalam melaksanakan tugasnya. Jika dewan komisaris memiliki skor tinggi, peran dewan lebih efektif dan manajer tidak melakukan *tax aggressiveness*.

Seprini (2016) membuktikan bahwa ukuran dewan komisaris berpengaruh terhadap *tax aggressiveness*. Sedangkan penelitian Fahriani dan Priyadi (2016) membuktikan bahwa komisaris independen berpengaruh terhadap *tax aggressiveness*. Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis yang diajukan :

H_1 : Efektivitas dewan komisaris berpengaruh negative terhadap *tax aggressiveness*

2. Pengaruh Efektivitas Komite Audit terhadap *Tax Aggressiveness*

Komite audit merupakan bagian dari dewan komisaris yang secara khusus bertanggung jawab untuk mengawasi pelaporan keuangan perusahaan. Jika komite

audit menjalankan tugasnya secara efektif maka tindakan agresivitas pajak dapat dicegah. Efektivitas peran komite audit juga dipengaruhi oleh beberapakarakteristik yang telah ditunjukkan dalam penelitian sebelumnya, yaitu independensi, aktivitas, ukuran, dan kompetensi.

Pengaruh karakteristik ini juga diukur dengan indeks atau skor untuk bisa mengukur semua karakteristik secara komprehensif. Di Indonesia, semua perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia memiliki komite audit dengan anggota independen, sesuai dengan peraturan BEI dan Bapepam-LK. Oleh karena itu, perbedaan dalam tingkat efektivitas komite audit diasumsikan hanya dipengaruhi oleh karakteristik komite audit aktivitas, ukuran dan kompetensi. Jika nilai efektivitas komite audit tinggi, maka komite audit harus melakukan pengawasan terhadap proses pelaporan keuangan lebih banyak, sehingga tindakan *tax aggressiveness* dapat ditekan.

Penelitian Seprini (2016) menemukan bukti bahwa intensitas pertemuan komite audit berpengaruh terhadap *tax aggressiveness*. Komite audit yang aktif melakukan pertemuan dapat melakukan fungsi pengawasan secara lebih aktif. Pengawasan yang lebih aktif oleh komite audit diharapkan mampu mengurangi kesempatan manajemen dalam melakukan kecurangan.

Armstrong (2013) menemukan bahwa keahlian akuntansi atau keuangan berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan yang diambil perusahaan, sehingga membantu mengontrol manajer agar berlaku sesuai kepentingan pemegang saham. Berdasarkan

uraian di atas, maka hipotesis yang diajukan :

H₂: Efektivitas komite audit berpengaruh negatif terhadap *tax aggressiveness*

METODE PENELITIAN

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia untuk periode pengamatan 2013-2015. Pemilihan sampel menggunakan *purposive sampling* didasarkan pada kriteria sebagai berikut :

1. Perusahaan melaporkan *annual report* dan *financial report* selama 3 tahun berturut-turut (tahun 2013-2015) dan tidak *delisting*
2. Tahun buku dalam laporan keuangan tahunan berakhir tanggal 31 Desember. Hal ini dilakukan untuk menjaga keseragaman sampel dan analisisnya.
3. Laporan keuangan tahunan disajikan menggunakan mata uang Rupiah. Penggunaan satuan mata uang selain Rupiah, meskipun dapat dikonversi, dapat menimbulkan perbedaan akibat kurs yang terus berubah.
4. Laporan tahunan dan laporan keuangan tahunan memiliki data yang dibutuhkan selama tiga (3) tahun penelitian (tahun 2013-2015),
5. Laba sebelum pajak positif

Pengukuran Variabel

Tax Aggressiveness

Penelitian ini menggunakan Effective Tax Rate (ETR) sebagai ukuran *tax aggressiveness* Rendahnya

nilai ETR menggambarkan tingginya tingkat agresivitas pajak. Sebaliknya tingginya nilai ETR menggambarkan rendahnya tingkat agresivitas pajak. Menurut Suprasto dan Suprimarini (2017) rumus untuk menghitung ETR (*Effective TaxRate*) adalah sebagai berikut :

$$ETR = \frac{\text{Total tax expense}}{\text{Pretax income}}$$

Efektivitas Dewan Komisaris dan Komite Audit

Pengukuran efektivitas dewan komisaris dan komite audit menggunakan *score* dihitung berdasarkan daftar faktor karakteristik tertentu. *Checklist* dikompilasi dengan mengacu pada daftar pertanyaan yang disiapkan oleh Indonesian Institute for Corporate Direksi (IICD) untuk penentuan indeks *corporate governance* mereka pada tahun 2005, dengan beberapa modifikasi sesuai dengan literatur yang mendukung penelitian ini. *Checklist* lengkap untuk skor dewan dan skor komite audit diberikan pada Lampiran 1.

Sesuai dengan metode penilaian yang digunakan dalam kuesioner IICD, untuk setiap pertanyaan ada tiga kemungkinan penilaian: Good, Fair dan Poor. Beberapa pertanyaan saja Dua kemungkinan, yaitu Good dan Poor. Nilai yang ditetapkan untuk Good adalah 3, Fair 2 dan Poor adalah 1. Untuk pertanyaan dengan informasi yang tidak memadai untuk menilai akan dianggap sebagai Poor. Penilaian itu didasarkan pada informasi *corporate governance* yang diungkapkan dalam laporan tahunan perusahaan.

Skor akhir untuk dewan komisaris dan audit committee adalah jumlah total skor untuk setiap karakteristik berdasarkan pertanyaan pada *checklist*. Seperti dalam penelitian Dhaliwal et al. (2007), total skor akan dikonversi menjadi variabel dummy. Dhaliwal dkk. (2007) menggunakan dua batasan dalam kisaran nilai dari 1 sampai 3 untuk konversi skor menjadi variabel dengan nilai 1, yaitu ketika nilai yang didapat lebih besar dari atau sama dengan 2, dan 0 jika sebaliknya. Penelitian ini menggunakan 17 pertanyaan untuk perhitungan *score* dewan komisaris dengan nilai yang mungkin untuk setiap pertanyaan adalah 1, 2 atau 3. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan ambang batas 34 (17 pertanyaan dikalikan dengan nilai 2) untuk mengonversi total skor dewan komisaris terhadap nilai variabel dummy. Nilai biner (1,0) untuk skor digunakan untuk menghindari masalah multikolinearitas dalam pengolahan data.

Model Regresi

Untuk menguji hipotesis mengenai pengaruh efektivitas dewan komisaris dan komite audit, penelitian ini menggunakan multiple regression analysis. Dengan model persamaan sebagai berikut :

$$ETR = \alpha + \beta_1 BSCORE + \beta_2 ACSCORE + e$$

Dimana :

ETR = *effective tax rate* (untuk mengukur *tax aggressiveness*)

BSCORE = *board score* (mengukur efektivitas dewan komisaris)

ACSCORE = *audit committee score*
(mengukur efektivitas
komite audit)

Berdasarkan hasil purposive sampling, diperoleh 105 perusahaan manufaktur yang dijadikan sampel penelitian, adapun kriteria pengambilan sampel pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Sampel Penelitian

Tabel 1. Hasil Seleksi Sampel Kriteria

Keterangan	Jumlah
Populasi	136
Perusahaan yang delisting di BEI selama periode 2013-2015	(9)
Perusahaan tidak menggunakan mata uang rupiah	(24)
Perusahaan tidak memiliki data lengkap	(47)
Laba sebelum pajak negatif	(20)
Jumlah	36
Akumulasi 3 tahun	108
Data outlier	(3)
Total sampel	105

Statistik Deskriptif

Descriptive statistic yang dilakukan bertujuan untuk mengetahui nilai *mean*, maksimum,

minimum dan standar deviasi dari variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini, seperti ditunjukkan dalam tabel berikut.

Tabel 2
Hasil Statistik Deskriptif
Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
BSCORE	105	19.0000	49.0000	35.7703	0.7400
ACSCORE	105	14.0000	33.0000	23.6303	0.4760
ETR	105	-4.4202	6.75	0.2163	0.4848
Valid N (listwise)	105				

Sumber : Data Diolah IBM SPSS 21, 2017

Nilai minimum skor dewan komisaris dalam penelitian ini sedikit di atas nilai minimum yang mungkin, yaitu 17 (17 pertanyaan dikalikan dengan nilai 1), namun skor maksimal sedikit di bawah kemungkinan skor maksimal, yaitu 51 (17 pertanyaan dikalikan dengan nilai 3). Skor dewan komisaris rata-rata ada di atas skor Fair (17 pertanyaan dikalikan dengan

nilai 2). Hal ini dapat disimpulkan rata-rata dewan komisaris dalam penelitian ini masih cukup efektif, karena sebagian masih adaskor dewan komisaris yang rendah.

Skor komite audit memiliki rata-rata 23,63, sedikit di atas nilai untuk penilaian Fair, yaitu 22 (11 pertanyaan dikalikan dengan nilai 2). Minimum sedikit di atas nilai minimum yang mungkin, yaitu 11

dan skor maksimum berada pada tingkat maksimum yang mungkin (11 pertanyaan dengannilai 3). Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas peran komite audit dalam hal ini rata-rata cukup efektif.

Nilai ETR minimum negative (-4.4202) menunjukkan perusahaan melakukan agresivitas pajak. Nilai ETR rata-rata positif sehingga dapat dikatakan bahwa perusahaan rata-rata tidak melakukan *tax aggressiveness*.

Tabel 3. Hasil Uji Statistik t
Hasil Analisis Regresi Efektivitas Dewan Komisaris, Efektivitas Komite
Audit dan Tax Aggressiveness
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	1.364	.130		10.506	.000
1 BSCORE	-.073	.019	-.472	-3.839	.000
ACSCORE	-.052	.020	-.326	-2.657	.009

a. Dependent Variable: ETR

Sumber: Data Diolah IBM SPSS 21, 2017

Berdasarkan uji signifikansi parameter individual (uji statistik t) dapat diketahui persamaan sistematis sebagai berikut:

$$\text{ETR} = 1.364 - .073 \text{ ACSCORE} - .052 \text{ ACSCORE} + e$$

Pembahasan Hasil Penelitian

1. Pengaruh Efektivitas Dewan Komisaris terhadap Tax Aggressiveness

Koefisien BSCORE negative dan signifikan pada 5%. Hasil ini menunjukkan bahwa efektivitas dewan komisaris berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *tax aggressiveness*. Dapat disimpulkan bahwa *tax aggressiveness* tidak terjadi jika perusahaan memiliki dewan komisaris yang efektif. Temuan penelitian ini memperkuat temuan penelitian sebelumnya antara lain Seprini (2016) dan Fahrani dan Priyadi (2016) bahwa ukuran dewan komisaris, serta proporsi komisaris independen berpengaruh

terhadap *tax aggressiveness*. Hermawan (2011) menilai karakteristik dewan komisaris dengan empat criteria yaitu ukuran, independensi, frekuensi pertemuan, dan kompetensi, yang digunakan dalam penelitian ini. Efektivitas dewan komisaris menunjukkan *good corporate governance*, sehingga dapat meningkatkan kualitas pelaporan keuangan perusahaan.

2. Pengaruh Efektivitas Komite Audit terhadap Tax Aggressiveness

Koefisien ACSCORE negative dan signifikan pada 5%. Hasil ini menunjukkan bahwa efektivitas komite audit berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *tax*

aggressiveness. Dapat disimpulkan bahwa *tax aggressiveness* tidak terjadi jika perusahaan memiliki komite audit yang efektif. Temuan penelitian ini memperkuat temuan penelitian sebelumnya antara lain Seprini (2016) dan Armstrong (2013) bahwa intensitas pertemuan, serta keahlian keuangan komite audit berpengaruh terhadap *tax aggressiveness*.

KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN

Penelitian ini dilakukan berdasarkan kerangka kerja konseptual *good corporate governance*, melalui peran efektif dewan komisaris dan komite audit yang akan mempengaruhi proses pelaporan keuangan perusahaan dan mengevaluasi tindakan manajer. Fungsi pengawasan yang dilakukan oleh dewan komisaris dan komite audit harus dapat mencegah tindakan manajemen yang oportunistik dan tidak selaras dengan kepentingan pemegang saham. Penelitian ini membuktikan bahwa efektivitas dewan komisaris dan komite audit berpengaruh terhadap *tax aggressiveness*.

Ada beberapa keterbatasan dalam penelitian ini. Penilaian untuk perhitungan skor didasarkan hanya pada informasi yang diambil dari laporan tahunan; oleh karena itu tunduk pada kesalahan dan inkonsistensi dalam interpretasi. Selanjutnya, penelitian ini mengasumsikan bahwa jika perusahaan tidak melakukannya mengungkapkan informasi lengkap tentang tata kelola perusahaan, maka perusahaan telah lemah tata kelola perusahaan dan akan diberi skor Miskin. Asumsi

ini mungkin tidak akurat. Mengungkapkan kondisi tata kelola perusahaan yang sebenarnya di perusahaan. Kriteria penilaian yang digunakan untuk mendapatkan peringkat Good, Fair and Poor juga bias mengandung bias karena kurang akurat dalam penentuan kriteria.

Saran untuk penelitian mendatang, sebaiknya menambah variable independen yaitu karakteristik dewan direksi dengan mengembangkan checklist untuk skor efektivitas dewan direksi. Hal ini perlu dilakukan mengingat di Indonesia mengadopsi *two-tier system* dimana dewan komisaris terpisah dari dewan direksi. Selain itu, menurut konsep *corporate governance*, dewan direksi yang memiliki peran utama dalam system pengawasan terhadap tindakan manajer.

DAFTAR PUSTAKA

- Armstrong, C.S., J.L. Blouin, A.D. Jagolinzer, dan D.F. Larcker. 2013. "Corporate Governance, Incentives, and Tax Avoidance." *Rock Center for Corporate Governance Stanford University, Working Paper Series* No. 136.
- Chen, Ken Y., and Jian Zhou. "Audit Committee, Board Characteristics, and Auditor Switch Decisions by Andersen's Clients." *Contemporary Accounting Research* 24, No. 4 (2007): 1085–1117
- Desai, M. A. dan D. Dharmapala. 2006. *Corporate Tax Avoidance and High Powered Incentives*. *Journal of Financial Economics*, 79, 145-179.
- Dhaliwal, Dan, Vic Naiker, and Farshid Navissi. "Audit Committee Financial Expertise,

- Corporate Governance and Accruals Quality: An Empirical Analysis.* Working Paper, (2007).
- Fahriani, Melinda dan Maswar Patuh Priyadi. 2016. "Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Tindakan Pajak Agresif Pada Perusahaan Manufaktur." *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi* 5(7):1–20.
- Henderson Global Investors (2005), "Responsible Tax, Henderson Global Investors", London, UK.
- Jensen, M., dan W.H. Meckling. 1976. *Theory Of The Firm: Magerial Behavior, Agency Cost And Ownership Structure.* *Journal Of Financial Economics* 3. Hal. 305- 360.
- Khurana, I.K. & William, J.M. (2012), "Institutional Shareholders' Investment Horizons and Corporate Tax Avoidance". *The Journal of the American Taxation Association*, In-Press
- Klein, April. "Audit Committee, Board of Director Characteristics, and Earnings Management." *Journal of Accounting and Economics* 33, (2002): 375-400.
- Lanis, R. dan G. Richardson. 2011. "The effect of board of director composition on corporate tax aggressiveness." *Journal of Accounting & Public Policy* 30 (2011), h. 50-70.
- Puspita, S. R dan Harto, Puji, 2014. "Pengaruh Tata Kelola Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak." Diponegoro journal of accounting *Volume 3, Nomor 2, Tahun 2014, Hal 1-13*
- Putranti, Anissa Setiawati dan Yulita Setiawanta. 2014. "Pengaruh Kepemilikan Institusional, Struktur Dewan Komisaris, Kualitas Audit Dan Komite Audit Terhadap Tax Avoidance." 1–14.
- Robinson, J.R., Y. Xue, dan M.H. Zhang. 2012. "Tax planning and financial expertise in the audit committee."
- Scholes, M., Wolfson, M., Erickson, M., Maydew, E. & Shevlin, T. (2005), "Taxes and Business Strategy: A Planning Approach", 3rd ed. Pearson Prentice Hall, Upper Saddle River, NJ.
- Slemrod, J. (2004), "The Economics of Corporate Tax Selfishness", *National Tax Journal* 57, 877–899.
- Seprini. 2016. "Pengaruh Good Corporate Governance dan Corporate Sosial Responsibility Terhadap Tindakan Pajak Agresif (Studi pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di BEI 2011-2013)." *JOM Fekon* 3(1):2238–52.
- Suprasto, Ni Putu Deiya dan Bambang Suprimarini. 2017. "pengaruh corporate social responsibility, kualitas audit, dan kepemilikan institusional pada agresivitas pajak." *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 19:1349–77.
- Suandy, Erly. 2008. *Perencanaan Pajak*. Edisi 4. Jakarta: Salemba Empat.
- Yeung C.T. (2010), "Effects of Corporate Governance on Tax Aggressiveness", An Honours Degree Project, Hong Kong Baptist University
- Zhou, Jian, and Ken Y. Chen. "Audit Committee, Board Characteristics and Earnings by Commercial Banks." Working Paper, (2004).